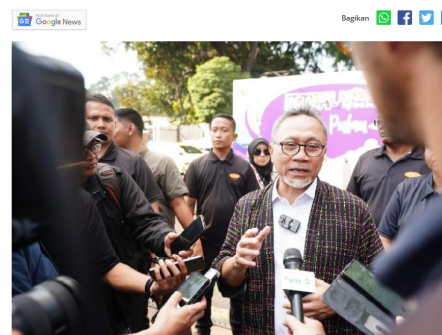


	News Title : Bappebti Blokir 1.075 Domain Situs Web Entitas Ilegal	
	Media Name : tempo.co	Journalist : istimewa
	Publish Date : 10 July 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Bappebti Blokir 1.075 Domain Situs Web Entitas Ilegal

Serini, 10 Juli 2023 19:20 WIB



Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

INFO NASIONAL – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, memblokir 1.075 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada semester pertama 2023.

Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti meminimalkan penawaran investasi PBK ilegal yang marak terjadi saat ini. "Bappebti akan terus melakukan patroli siber terhadap entitas-entitas yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran investasi perdagangan berjangka ilegal di Indonesia, baik melalui situs internet, media sosial, maupun media daring lainnya," kata Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, Kamis, 6 Juli 2023.

Hal tersebut bertujuan agar promosi, iklan, dan penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka tidak dapat diakses di wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi ilegal. Selain itu, juga merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum berusaha bagi para pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka.

Didid menambahkan, untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia, setiap pihak wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bappebti. "Bertransaksi di entitas ilegal, apalagi yang berada di luar negeri sangat berisiko. Bappebti tidak dapat memfasilitasi masyarakat dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara masyarakat dengan entitas ilegal tersebut."

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, saat ini masih marak penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka. Modus ini sering dijumpai di tengah masyarakat melalui aplikasi pesan seperti Whatsapp, Telegram, dan sejenisnya.

"Masyarakat diiming-imingi keuntungan yang besar dari titip dana trading. Setelah melakukan transfer dana, bukan keuntungan yang diperoleh, justru kerugian yang diderita," ucap Aldison.

Selain modus tersebut, juga dijumpai penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka atau aset kripto dengan skema *member get member*. Dalam perdagangan berjangka, dilarang menggunakan mekanisme perekrutan nasabah tersebut maupun Multi Level Marketing (MLM).

Bappebti mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat, apalagi menjanjikan tidak adanya risiko. Perdagangan berjangka bersifat *high risk, high return*. Artinya, selain dapat mendatangkan keuntungan yang besar, juga berpotensi menderita kerugian yang tidak kalah besarnya.

"Untuk itu, sebelum memutuskan berinvestasi, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaannya serta mempelajari serta mengenali risiko investasi tersebut. Untuk mengetahui legalitas perusahaan yang menawarkan perdagangan berjangka, dapat diakses melalui situs web resmi Bappebti di tautan <https://ceklegalitas.bappebti.go.id/>," kata Aldison. (*)